



Dinsosnakertrans Inventarisir Awal KMS 2016

YOGYA (MERAPI) - Persiapan pendataan penerima Kartu Menuju Sehat (KMS) tahun 2016 mulai dilakukan Pemkot Yogyakarta. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta kini melakukan inventarisir awal untuk pendataan KMS tersebut.

"Kami lakukan inventarisir awal. Sudah mengumpulkan data-data awal seperti inventarisir pemegang KMS tahun ini dengan warga miskin yang belum masuk," kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar, Senin (20/4).

Pendataan KMS tahap pertama akan dilakukan pada Mei 2015. Pendataan tahap pertama itu berupa usulan baru pemegang KMS dari wilayah. Pemegang KMS yang diusulkan tersebut dinilai warga miskin dan memenuhi kriteria KMS. "Parameter KMS tidak ada perubahan. Setelah didata awal, Juni dijadwalkan untuk uji publik data KMS 2016 tahap pertama," paparnya.

Pendataan juga dengan verifikasi atau pengecekan data di lapangan. Data KMS juga akan melalui uji publik tahap kedua dengan melibatkan wilayah agar tidak ada warga miskin dan rentan miskin yang tercecer.

Jumlah penerima KMS tahun 2015 ditetapkan sebanyak 18.881 kepala keluarga (KK). Jumlah itu turun 7,81 persen dibanding pene-

rima tahun sebelumnya sebanyak 20.481 KK. KMS adalah program jaminan sosial dari pemkot bagi warga miskin dan rentan miskin di Kota Yogyakarta untuk mengakses pendidikan dan santunan kematian.

Selain itu Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga akan dilibatkan dalam validasi data rumah tangga sasaran (RTS) warga miskin dari pemerintah pusat. Data itu berkaitan dengan program-program bantuan bagi warga miskin dari pemerintah pusat seperti beras miskin (Raskin) dan bantuan lainnya. Validasi hasil survei itu untuk menjamin data valid dan sesuai sasaran.

"BPS akan melakukan survei bulan Mei. Setelah itu, data hasil survei dilimpahkan ke kabupaten dan kota untuk divalidasi. Data yang sudah divalidasi dan sepakati kabupaten atau kota itu yang akan ditetapkan," ucap Hadi.

Selama ini sasaran program bantuan dari pemerintah pusat bagi warga miskin mengacu pada hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dari BPS tahun 2011. Namun setelah diverifikasi dengan data di lapangan, ditemui ketidaksesuaian data. Misalnya pada bantuan raskin warga yang sudah meninggal atau pindah tempat, akhirnya dilakukan musyawarah kelurahan untuk penerima pengganti. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005